

**PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN
DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA APARATUR
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL**

(Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul)

Oleh :

EEN ANJAYA

Fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah yogyakarta

Email : eenanjaya14@gmail.com

ABSTRACT

This study was aimed at finding out the effect of budget participation, budget goal clarity and organization commitment on the performance of the regional government of bantul regency. The object in this study is the Regional Organization (OPD) in Bantul Regency. The subjects of this study consisted of populations and samples that were in accordance with the research that would be conducted. The population in this study were all Bantul Regency government agencies. The sample in this study included the head of section, head of field, head of subdivision, head of subdivision and section head with 5 questionnaires at each DPO, so the total number of respondents in this sample was 96 people. The data collection technique used in this study was a questionnaire. Test assumptions used were normality test, multicollinearity test and heteroscedasticity test. The data analysis tool uses descriptive analysis and multiple linear regression analysis.

The results of this study indicate that: 1) There is a positive influence of budget participation on the performance of Bantul Regency Regional Government apparatus, 2) There is a positive influence of budget goal clarity on the performance of Bantul Regency Regional Government apparatus, and 3) There is a positive influence of organization commitment on the performance of the Bantul Regency Regional Government apparatus.

Keywords: participation budget, budget goal clarity, organizational commitment, performance of the apparatus

PENDAHULUAN

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota diberi kewenangan oleh pemerintah pusat supaya mengurus rumah tangga daerah sendiri dengan potensi yang ada secara optimal. Penerapan otonomi daerah memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tujuan dari peningkatan

kualitas kualitas sumber daya manusia untuk mengubah perilaku menjadi lebih baik dan mampu melaksanakan aktivitas di segala bidang. Perubahan perilaku PNS tersebut diharapkan dapat mempengaruhi tindakan sehingga tujuan dan tugas akan tercapai.

Pemerintah berkepentingan untuk meningkatkan kinerja aparatur dengan mengeluarkan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2014 Pasal 75 menyebutkan penilaian kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja pada tingkat individu dan unit atau satuan organisasi dengan melihat target, sasaran, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Sementara itu peraturan pemerintah masih menggunakan PP Nomor 46 mengenai penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Prestasi kerja PNS akan dinilai berdasarkan dua unsur yaitu, sasaran kerja pegawai (SKP) dan perilaku kerja. Selain itu pemerintah mengambil kebijakan untuk meningkatkan kinerja melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) pegawai, penegakan disiplin PNS dan sistem remunerasi di lingkungan kerja instansi pemerintah.

Sebagai organisasi yang memberikan pelayanan kepada umum/masyarakat, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kinerja yang berfokus pada kepentingan masyarakat serta mendorong pemerintah untuk memperhatikan lingkungannya, dengan tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik secara berkualitas dan transparan. Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mencerminkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai terhadap program serta kebijakan yang ditetapkan.

Tabel 1.1.
Pencapaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015

Sasaran Strategis	Indikator kinerja utama	Kinerja	
		Target	Realisasi
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas	<i>Indonesia Governance Index (IGI)</i>	57	62,9

Sumber: LKJ, Kabupaten Bantul 2016

Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) juga memberikan hasil yang baik. Tahun 2016 Kabupaten Bantul mendapatkan nilai 3,3 (Sangat Tinggi). Tahun 2016 merupakan kedua kalinya Bantul masuk kedalam peringkat 10 (sepuluh) besar berprestasi kinerja terbaik dan mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. Namun demikian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Bantul pada tahun 2016 belum menunjukkan adanya perubahan signifikan (Korpri, 2017). Di Indonesia tercatat dua pemerintah kabupaten dan kota yang meraih predikat A atas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahannya. Keduanya adalah Pemerintah Kota Bandung dan Kabupaten Banyuwangi yang berada pada wilayah regional I dan II pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Fenomena tidak ada peningkatan kinerja pemerintah harus disikapi secara serius. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah salah satunya adalah anggaran. Anggaran dapat menjadi sebuah ukuran dan bisa menjadikan dasar penilaian apakah suatu bagian/unit kerja telah bekerja dengan baik sesuai target dan memenuhi efisiensi biaya. Anggaran yang digunakan harus tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan sehingga diperlukan kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan. Penyusunan anggaran yang baik harus melibatkan pegawai dan manajer atau yang lebih dikenal dengan istilah partisipasi anggaran. Penyusunan anggaran yang melibatkan pegawai dan manajer diharapkan dapat sesuai dengan realita yang ada dilapangan. Partisipasi anggaran

adalah sebuah konsep dimana bawahan dilibatkan dalam pengambilan keputusan sesuai tingkat tertentu bersama atasannya.

Tabel 1.2.
Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2013-2014

No	Rincian	2014	
		Target	Realisasi
A	Pendapatan	1.733.247.144.497,78	1.813.917.142.695,75
1.1	Pendapatan Asli Daerah	288.038.728.992,34	357.411.062.723,21
1.2	Dana Perimbangan	1.042.578.600.994,00	1.036.632.898.871,00
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	402.629.814.511,44	419.873.181.101,54
B	Belanja	1.596.306.516.083,47	1.700.351.278.809,56
1	Belanja Tidak Langsung	1.103.697.182.625,47	978.483.338.793,56
2	Belanja Langsung	492.609.333.458,00	721.867.940.016,00
C	Surplus	136.940.628.414,31	113.565.863.886,19
	Pembiayaan		
1	Penerimaan Daerah	211.628.963.013,69	213.163.271.394,69
2	Pengeluaran Daerah	43.520.281.000,00	43.309.252.682,12
	Surplus	168.108.682.013,69	169.854.018.712,57

Sumber: <http://bkad.bantulkab.go.id/>

Partisipasi anggaran merupakan suatu untuk membuat sebuah sistem pengendalian manajemen dengan baik sehingga diinginkan dapat memperoleh target institusi yang terikat. Pemerintah daerah melalui petugas perangkat daerah yang berpartisipasi dalam proses penganggaran diharapkan mendapat peluang untuk mengambil langkah dalam pengambilan keputusan dengan perencanaan anggaran. Partisipasi yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja, yaitu ketika suatu tujuan dirancang dan secara partisipatif disetujui. Terdapat pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur perangkat daerah (Nurhalimah dkk, 2013). Semakin besar tingkat partisipasi pegawai, maka semakin meningkat juga kinerja pegawai dalam penyusunan anggaran (Yanida dkk, 2013). Hasil penelitian Raditya, dkk (2014) juga menyatakan terdapat pengaruh positif partisipasi anggaran terhadap kinerja jajaran aparat pemerintah.

APBD Pemerintah Kabupaten Bantul tahun 2013/2014, cukup besar pada penggunaan belanja tidak langsung yang digunakan untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan tidak terduga. Penggunaan belanja yang tidak

transparan akan menimbulkan kecurigaan diantara aparaturnya di lingkungan pemerintah sehingga timbul ketidakpercayaan. Akibat yang ditimbulkan kondisi kerja yang kurang sehat, sehingga aparaturnya dalam bekerja menjadi tidak optimal. Kejelasan anggaran baik dari segi sumber maupun penggunaan menjadi sangat penting bagi kondisi kerja yang berdampak pada kinerja aparaturnya.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan dimana tujuan anggaran ditentukan dengan terbuka atau transparan. Kejelasan anggaran juga bertujuan supaya anggaran dapat dipahami bagi individu yang bertanggungjawab sehingga dapat mencapai sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran akan membuat pegawai mudah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi. Kejelasan anggaran juga dapat menjadi tolak ukur untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Partisipasi dari para staf maupun pegawai dalam menyusun anggaran dapat mendorong moral kerja yang tinggi sehingga keberhasilan pegawai dalam melaksanakan tugas juga akan meningkat. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparaturnya perangkat daerah (Sari dkk, 2014). Hasil penelitian Mardika, dkk (2015) dan Latif (2014) juga membuktikan bahwa kejelasan tujuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparaturnya pemerintah daerah.

Selain partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran, komitmen organisasi juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja. Organisasi menilai kesetiaan dan keikatan para pegawai, dimana pegawai yang mempunyai komitmen akan bekerja secara lebih keras dan dapat mencapai kesuksesan lebih besar daripada mereka yang tidak setia dan tidak mempunyai rasa keterikatan. Komitmen organisasi merupakan tingkat dimana pegawai merasa menjadi bagian dari organisasi. Pegawai yang mempunyai komitmen organisasi tentunya akan mengaitkan dirinya ke organisasi tertentu

dan sasaran-sasarannya, dan berharap dapat mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Pegawai yang mempunyai komitmen tinggi terhadap organisasi diharapkan akan meningkat kinerja dari pegawai tersebut (Yunanto dan Mulyanto, 2014). Pegawai yang memiliki komitmen, memiliki kesetiaan yang tinggi, maka karyawan akan bekerja dengan seoptimal mungkin demi tercapainya kinerja yang baik (Abrivianto dkk, 2014). Hasil penelitian Usman dan Paranoa (2013) membuktikan bahwa komitmen organisasi sebagai variable moderasi memperkuat hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Penelitian ini akan membahas kinerja aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Parisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul”** (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul).

Penelitian ini melakukan komplikasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan Nurhalimah dkk (2013) dalam menguji “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Daerah di Pemerintah Aceh”. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah menambahkan variabel indepenen yaitu komitmen organisasi.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul?
2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul?

3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul?
4. Apakah partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul?

Dan hasil dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, diantaranya :

1. Bagi Pemerintah

Hasil analisis diharapkan dapat menjadi bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bantul untuk mengevaluasi kinerja aparatur pemerintah daerah

2. Bagi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi empiris mengenai pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

3. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi kepala dinas untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran dan komitmen organisasi.

4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pelaksanaan kinerja aparatur pemerintah daerah, khusus pada penerapan partisipasi anggaran dan kejelasan anggaran.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur

Penelitian Nurhalimah dkk (2013) membuktikan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur perangkat daerah di Pemerintah Aceh. Yanida, dkk (2013) juga menyatakan semakin besar tingkat partisipasi pegawai dalam penyusunan anggaran, maka kinerja pegawai juga akan meningkat. Raditya, dkk (2014) juga menyatakan terdapat pengaruh positif partisipasi anggaran terhadap kinerja jajaran aparat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Terdapat pengaruh positif partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah

2. Kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparatur

Hasil penelitian Sari, dkk (2014) membuktikan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada SKPD. Mardika, dkk (2015) menyatakan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan dari kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja pegawai. Penelitian Latif (2014) juga

membuktikan bahwa kejelasan tujuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Terdapat pengaruh positif kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah

3. Komitmen organisasi terhadap kinerja aparatur

Yunanto dan Mulyanto (2014) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten. Abrivianto, dkk (2014) membuktikan terdapat pengaruh signifikan pada komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Penelitian Usman dan Paranoa (2013) membuktikan bahwa komitmen organisasi sebagai variabel moderasi memperkuat hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disusun hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Terdapat pengaruh positif komitmen organisasi terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah

METODE PENELITIAN

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari responden yang diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada pegawai pemerintah Kabupaten Bantul.

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Menurut Sugiyono (2008:115), "Populasi merupakan wilayah generalisasi pada obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan". Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pegawai instansi pemerintah Kabupaten Bantul yang mengetahui penerapan standar akuntansi

pemerintah berbasis akrual yaitu Kabid dan Staff Akuntansi/Keuangan. Jumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Kabupaten Bantul sebanyak 20 Dinas dan masing-masing Dinas diambil 5 orang, sehingga jumlah sampel sebanyak 100 orang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey, yaitu metode pengumpulan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada pegawai di Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data dengan menyusun daftar pernyataan yang terkait dengan masalah atau tujuan dari penelitian dan setelah itu dibagikan kepada responden yang sudah ditetapkan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Peraturan daerah mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

Sampel dalam penelitian ini adalah 5 orang pegawai yang meliputi kepala bagian, kepala bidang, kepala subbagian, kepala subbagian dan kepala seksi di OPD Kabupaten Bantul. Penyebaran kuesioner dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2018

sampai 15 Oktober 2018. Peneliti telah menyebarkan kuesioner sebanyak 100 eksemplar kepada responden yang diperoleh dari 20 dinas, masing-masing dinas diambil 5 orang. Responden yang mengembalikan kuesioner sebanyak 98 buah namun ada 2 orang yang tidak mengisi secara lengkap baik data pribadi maupun pernyataan-pernyataan dalam angket. Jumlah kuesioner yang digunakan dalam analisis sebanyak 96 buah.

Tabel 4.1
Analisis Pengembalian Kuesioner

Kuesioner	Jumlah	Persen (%)
Jumlah yang disebar	100	100,0
Kembali	98	98,0
Tidak diisi dengan lengkap	2	2,0
Total diolah	100	96,0

Sumber: Hasil olah data

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 100 kuisisioner yang disebarkan kepada responden, jumlah kuisisioner yang kembali adalah 98 eksemplar atau dengan kata lain penelitian ini mempunyai response rate sebesar 98,0%. Dari jumlah kuisisioner yang kembali diperoleh kuisisioner yang tidak diisi lengkap (cacat) yaitu sejumlah 2 eksemplar. Sehingga kuisisioner yang diolah dalam penelitian ini yaitu sejumlah 96 eksemplar.

Tabel 4.10
Hasil Uji Normalitas *One Sample Kolmogorov-Smirnov*

	Z	p-value	Kesimpulan
<i>One-Sample KS</i>	0,783	0,572	Normal

Sumber: Hasil olah data

Nilai *p-value (2-tailed)* pada Tabel 4.10 sebesar 0,572 atau lebih besar dari 5% sehingga data dalam model regresi terdistribusi normal.

Tabel 4.11
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel bebas	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
Partitipasi anggaran (X1)	0,959	1,043
Kejelasan anggaran (X2)	0,887	1,128
Komitmen organisasi (X3)	0,899	1,113

Sumber: Hasil olah data

Nilai VIF untuk variabel partisipasi anggaran sebesar 1,043 atau kurang dari 10 sehingga tidak ada gejala multikolinearitas pada variabel tersebut. Nilai VIF untuk kedua variabel kejelasan anggaran (1,128) dan komitmen organisasi (1,113) juga lebih kecil dari 10, sehingga kedua variabel tersebut tidak ada gejala multikolinearitas.

Tabel 4.12
Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel terikat	Variabel bebas	<i>p value</i>
Abs Ut	Partitipasi anggaran (X1)	0,535
	Kejelasan anggaran (X2)	0,176
	Komitmen organisasi (X3)	0,674

Sumber: Hasil olah data

Hasil perhitungan uji Glejser menunjukkan semua variabel bebas tidak berpengaruh terhadap nilai absolut nilai residu (Abs Ut), karena memiliki nilai signifikan lebih besar dari 5%. Kesimpulan dari uji Glejser tersebut adalah model regresi tidak menunjukkan gejala heterokedastisitas.

1. Hasil Pengujian Regresi Berganda

Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk merumuskan pengaruh variabel sosialisasi, kesadaran dan persepsi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil perhitungan analisis regresi linear berganda dapat dijelaskan pada Tabel 4.13 di bawah ini:

Tabel 4.13
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koef. B	Beta	<i>t-value</i>	<i>p-value</i>
Konstanta	23,251		5,432	0,000
Partitipasi anggaran (X1)	0,464	0,414	5,246	0,000
Kejelasan anggaran (X2)	0,274	0,252	3,070	0,003
Komitmen organisasi (X3)	0,461	0,305	3,742	0,000
Adj R ²	0,431			
Fstatistik	25,027			
<i>p-value</i>	0,000	(F-stat)		

Sumber: Hasil olah data

Hasil perhitungan regresi linear berganda diatas dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 23,251 + 0,464X_1 + 0,274X_2 + 0,461X_3$$

2. Uji Nilai F

Hasil perhitungan Uji F pada Tabel 4.13 diperoleh *p-value* (0,000) < α (0,05) yang berarti terdapat pengaruh positif variabel-variabel partisipasi anggaran, kejelasan anggaran dan komitmen organisasi secara bersama-sama terhadap variabel kinerja aparatur.

3. Uji Nilai T

a. Hasil Pengujian H₁

Hasil analisis regresi linear berganda diperoleh nilai koefisien variabel partisipasi anggaran sebesar 0,464 (positif) dengan *p-value* (0,000) < α (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur, sehingga hipotesis pertama diterima.

b. Hasil Pengujian H₂

Hasil analisis regresi linear berganda diperoleh nilai koefisien variabel kejelasan anggaran sebesar 0,274 (positif) dengan *p-value* (0,003) < α (0,05)

sehingga dapat disimpulkan bahwa kejelasan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur, sehingga hipotesis kedua diterima.

c. Hasil Pengujian H₃

Hasil analisis regresi linear berganda diperoleh nilai koefisien variabel komitmen organisasi sebesar 0,461 (positif) dengan *p-value* (0,000) < α (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur, sehingga hipotesis ketiga diterima.

Secara keseluruhan hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.14 sebagai berikut :

Tabel 4.14
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Kode	Hipotesis	Hasil
H ₁	Partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap aparatur pemerintah daerah	Diterima
H ₂	Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap aparatur pemerintah daerah	Diterima
H ₃	Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemerintah daerah	Diterima

4. Uji Koefisien Determinasi

Nilai *Adjusted R square* sebesar 0,431 menunjukkan bahwa 43,1% variasi kinerja aparatur dapat dijelaskan oleh variabel-variabel partisipasi anggaran, kejelasan anggaran dan komitmen organisasi, sedangkan sisanya sebesar 56,9% dijelaskan variabel lain di luar model.

A. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur

Hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini membuktikan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Nurhalimah dkk (2013) membuktikan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur perangkat daerah di Pemerintah Aceh. Yanida, dkk (2013) juga menyatakan semakin besar tingkat partisipasi pegawai dalam penyusunan anggaran, maka kinerja pegawai juga akan meningkat. Raditya, dkk (2014) juga menyatakan terdapat pengaruh positif partisipasi anggaran terhadap kinerja jajaran aparat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali.

Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan sebuah pendekatan yang berguna untuk meningkatkan kinerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas organisasi. Partisipasi anggaran dapat dipakai sebagai alat pencapaian tujuan dan alat untuk mengintegrasikan kebutuhan individu dan organisasi. Partisipasi anggaran diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan kinerja. Ketika sebuah tujuan yang dirancang dan secara partisipatif disetujui, maka pegawai akan mendukung tujuan yang ditetapkan serta memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya, karena mereka ikut terlibat dalam proses penyusunan anggaran tersebut.

2. Pengaruh kejelasan anggaran terhadap kinerja aparatur

Hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini membuktikan bahwa kejelasan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Hasil penelitian penelitian ini sejalan dengan Sari, dkk (2014) membuktikan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada SKPD. Mardika, dkk (2015) menyatakan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan dari kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja

pegawai. Penelitian Latif (2014) juga membuktikan bahwa kejelasan tujuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.

Kejelasan sasaran anggaran dapat diartikan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik. Tujuan dari kejelasan sasaran anggaran yaitu anggaran yang akan dibuat mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan dengan bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Dengan demikian kejelasan sasaran anggaran akan mempunyai pengaruh terhadap kinerja dari pelaksana anggaran itu sendiri. Oleh sebab itu kejelasan sasaran anggaran akan mempermudah suatu organisasi dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dengan mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja.

3. Pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja aparatur

Hasil analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini membuktikan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Yunanto dan Mulyanto (2014) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten. Abrivianto, dkk (2014) membuktikan terdapat pengaruh signifikan pada komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Penelitian Usman dan Paranoa (2013) membuktikan bahwa komitmen organisasi sebagai variabel moderasi memperkuat hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

Komitmen organisasi mengacu pada bentuk pembelajaran, ketetapan yang kompeten akan pandangan dan sasaran bentuk instansi, demikian itu dukungan yang kompeten dalam menjaga kedudukan pada instansi untuk mendapatkan tujuan

instansi. Komitmen organisasi adalah sistem ketaatan, suatu bentuk rela berkorban untuk menyampaikan pendapat kemampuan dan tanggung jawab yang lebih kepada organisasi atau perusahaan serta kesuksesan akan tercapainya tujuan terhadap organisasi atau perusahaan. Pegawai yang mempunyai komitmen, mempunyai loyalitas yang besar, sehingga karyawan akan bekerja dengan semaksimal mungkin demi tercapainya kinerja yang baik.

KESIMPULAN

1. Terdapat pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
2. Terdapat pengaruh kejelasan anggaran terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
3. Terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

SARAN

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dapat melakukan upaya-upaya agar seluruh aparatur bertanggung jawab dan ikut berpartisipasi terhadap penyusunan anggaran, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.21/2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri No.13/2006.
2. Pengumpulan data berikutnya dapat dilengkapi dengan wawancara maupun observasi untuk mendukung hasil kuesioner, dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih mendalam.

KETERBATASAN PENELITIAN

1. Penelitian ini hanya mencakup subyek yang terbatas yaitu pegawai di OPD Kabupaten Bantul, sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisir untuk kasus wajib pajak di provinsi atau kabupaten lainnya.
2. Variabel yang diteliti berpengaruh terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah hanya tiga yaitu partisipasi anggaran, kejelasan anggaran dan komitmen organisasi sehingga masih banyak variabel lain yang belum diteleiti.

IMPLIKASI

1. Dampak Ekonomi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan anggaran yang partisipasif dan jelas.

2. Dampak Sosial

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan OPD Kabupaten Bantul untuk meningkatkan kinerja apartur.

3. Dampak Lingkungan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan komitmen organisasi khususnya yang berhubungan dengan lingkungan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrivianto OP, Swasto B dan Utami, HN. 2014. Pengaruh Motivasi Kerja dan Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Karyawan Bagian HRD PT. Arthawena Sakti Gemilang Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, Vol. 7 No. 2.
- Alumbida, D.I., Saerang, D.P.E., dan Ilat, V. (2016) Pengaruh Perencanaan, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Accountability*, Vol. 5. No. 2.
- As'ad, M, 2001, *Psikologi Industri*, Edisi Keempat, Cetakan Kelima, Liberty, Yogyakarta.
- Connelly, B. L., S. T. Certo., R. D. Ireland., dan C. R. Reutzel. 2011. Signalling. Theory: A Review and Assessment. *Journal of Management*.Vol.37, No.1.
- Daniri, Achmad, Mas. 2005. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Ray Indonesia, Jakarta.
- Desrler, G. 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Indonesia, Diterjemahkan Benyamin Molan, PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Donaldson. Lex and James H. Davis. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholders Returns. *Australian Journal of Management*, Volume 16, p 49-56.
- Garrison, RH dan Eric W. Noreen. 2000. *Akuntansi Manajerial.Edisi 1*. Terjemahan Totok Budisantoso. Jakarta: Salemba Empat.
- Gibson, JL, Ivancevich, JM, Donnelly, JH and Konopaske. 2009. *Organizations: Behavior, Structure, Processes, Fourteenth Edition*. New York: McGraw-Hill.
- Handoko, H. 2003, *Manajemen Personalialia Dan Sumber Daya Manusia*, cetakan kedua belas, dicetak dan diterbitkan oleh BPFE, Yogyakarta.
- Korpri, 2017. Pemerintah Daerah Dengan Kinerja Buruk Harus Segera Berbenah Diri. <https://korpri.id/berita/2742/pemerintah-daerah-dengan-kinerja-buruk-harus-segera-berbenah-diri>.
- Kreitner, Rand Kinicki, A. 2005. *Perilaku Organisasi*. Edisi Bahasa Indonesia Jakarta : Salemba Empat.
- Latif, A. 2014. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan dan Evaluasi terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Al-Buhuts*, Vol. 10, No.1.
- Lenda, SN. 2013. Pengaruh Budaya Birokrasi terhadap Kinerja Aparatur di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Journal Ekonomi*, Vol, II. No. 4.
- Mardiasmo. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi.

- Mardika KY, Bagia IW dan Suwendra, IW. 2015. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Pegawai Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng. *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 3 No.1.*
- Marliana H, Rahayu S dan Yudi. 2012. Analisis Kinerja Anggaran Satker Balai Taman Nasional Berbak Jambi. *e-Jurnal BINAR AKUNTANSI Vol. 1 No. 1.*
- Martoyo, S. 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta.
- Munandar, AS. 2001, *Psikologi Industri dan Organisasi*, UI Press, Jakarta.
- Nurhalimah, Darwanis dan Abdullah. 2013. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Perangkat Daerah di Pemerintah Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol.2, No.1.*
- Prawirosentono, S. 2002. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
- Raditya KD, Sukarsana IM dan Yasa, IMM. 2014. Analisis Kinerja Aparat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Vol. 3, No. 10.*
- Robbins, SP., 2002, *Organizational Behavior*, Upper Saddle River, New Jersey Prentice-Hall Inc.
- Ruky, A, 2002, *Sistem Manajemen Kinerja*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sari DPIP, Sinarwati NK dan Sujana E. 2014. Pengaruh Akuntabilitas, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng). *e-Journal Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 2 No. 1.*
- Sugiyono, 2009. *Statistik untuk Penelitian*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Usman, E dan Paranoan, S. 2013. Anggaran Partisipatif dalam Menunjang Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol.4, No.1.*
- Yanida M, Sudarma M dan Rahman, AF. 2013. Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah. *JAMAL Vol.4, No. 3.*
- Yunanto, A dan Mulyanto, 2014. Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi terhadap Motivasi Kerja dan Kinerja Pegawai BKD Klaten. *ADVANCE, Vol.1 No. 2.*